Status Revisi RTRW Provinsi di Wilayah II
dan Target Fasilitasi Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
2022-2023

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
1	Sulawesi Tengah	No. 1 Tahun 2023	Proses Penetapan Perda	No. 10 Tahun 2017	Matek RZWP3K Berubah. Pertek KKP No. .469/MEN-KP/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022	● Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada tanggal 27 Januari 2022 ● Telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Menteri KKP tanggal 24 Juni 2022 Nomor B.469/MEN-KP/VI/2022. ● Telah mendapatkan Berita Acara Peta Dasar pada tanggal 30 September 2022 Nomor 30.1/DGIG-PTRA/IGT.02.04/9/2022 ● Telah mendapatkan validasi KLHS pada tanggal 22 September 2022 Nomor S.1521/Menlhk-PKTL/Pdlkws/Pla.3/9/2022 ● Batas Wilayah: a. Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan : telah	● Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada Tanggal 12 Desember 2022 ● Telah mendapat surat persetujuan substansi pada 11 April 2023 ● Evaluasi Kemendagri Tanggal 20 Juni 2023 ● Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 Tanggal 11 Juli 2023	-

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						mendapatkan Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 22 Oktober 2021, terdiri dari: ★ Kab. Poso dengan Kab. Luwu Timur ★ Kab. Morowali dengan Kab. Luwu Timur ★ Kab. Morowali Utara dengan Kab. Luwu Timur ★ Kab. Sigi dengan Kab. Luwu Utara ★ Kab. Poso dengan Luwu Utara b. Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat : ★ Kab. Donggala dengan Kab. Pasangkayu : Permendagri 60 Tahun 2018 ★ Kab. Sigi dengan Kab. Pasangkayu : Permendagri 8 Tahun 2019 ★ Kab. Sigi dengan Kab. Mamuju		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Tengah : telah mendapatkan berita acara kesepakatan pada tanggal 15 Juni 2021 c. Sulawesi Tengah dengan Gorontalo: ★ Kab. Buol dengan Kab. Gorontalo Utara: telah mendapatkan berita acara kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2021 ★ Kab. Buol dengan Kab. Pohuwato: telah mendapatkan berita acara kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2021 ★ Kab. Parigi Moutong dengan Kab. Pohuwato: Permendagri 110 Tahun 2018 d. Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara: ★ Kab. Morowali dengan Kab.		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Konawe Utara: Permendagri 45 Tahun 2010 ★ Kab. Morowali dengan Kab. Konawe: Permendagri 45 Tahun 2010 ● Telah dilaksanakan pembahasan muatan RTRWP integrasi dengan FPR dan penyepakatan dengan kabupaten/kota pada tanggal 28 Juni 2022 ● Validasi KLHS Tanggal 22 September 2022		
2	Nusa Tenggara Barat	No.3 Tahun 2010	Proses Revisi	No. 12 Tahun 2017	Matek RZWP3K Berubah Telah mendapatkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan dengan	● Telah melaksanakan KP I pada tanggal 6 November 2018 dan KP II pada tanggal 7 November 2018 ● Telah melakukan pembahasan dengan provinsi berbatasan yaitu dengan Provinsi Bali pada tanggal 3 Desember 2018 dan dengan Provinsi NTT pada tanggal 13 Desember 2017 ● Telah mendapatkan validasi KLHS Terintegrasi pada		Terdapat permasalahan ketidaksesuaian kawasan hutan dan APL di Kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Anyer. Penyepakatan LSD masih berproses di Dirjen DAL (sudah ada BA, tapi belum ada penetapan SK). File belum diberikan oleh Dirjen DAL ke Daerah.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
					Nomor B.906/MEN-KP/IX/2022 pada tanggal 28 September 2022	tanggal 3 Februari 2023 dengan Nomor S.185/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 ● Telah mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8.3/DIGT-BIG/IGT.02.04/3/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari BIG ● Telah melakukan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham dengan pembahasan tertuang dalam BA Pengharmonisasian No. W.21-PP.03.03-4858 tanggal 2 Desember 2022		Penyepakatan KP2B antara Pemerintah Provinsi akan dilaksanakan setelah adanya SK Penetapan LSD.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
3	Papua	No.23 Tahun 2013	Persub	Belum Memiliki Perda RZWP3K, Tidak Perlu Surat Perubahan (langsung diintegrasikan dalam revisi RTRW)	Telah mendapatkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Nomor B.307/MEN-KP/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022	● Linsek 9 Mei 2023 ● Persub dengan Nomor B/PB.06.01/3097/IX/2023 tanggal 19 September 2023	Menunggu hasil evaluasi kemendagri dan penetapan menjadi Peraturan Daerah	-
4	Kalimantan Timur	No.1 Tahun 2016	Proses Revisi	No.22 Tahun 2021	Matek RZWP3K Tidak Berubah	● Linsek 18 November 2022 ● Persub dengan nomor B/PB.01/280/II/2023 tanggal 8 Februari 2023	Perda No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042	-
5	Kalimantan Tengah	No.5 Tahun 2015	Proses Revisi	No.1 Tahun 2019	Matek RZWP3K Tidak Berubah	● Konsultasi Publik II dilaksanakan tanggal 9 Desember 2021 ● Telah mendapatkan BA Peta Dasar pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan	● Mengintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir yang ada di dalam Perda RZWP3K ke dalam RTRWP	● Terkendala mendapatkan jadwal pasti pembahasan substansi Ranperda bersama dengan DPRD Prov.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						nomor 21.5/DGIG-PTRA/IGT.02.04/10/2022 ● Telah mendapatkan Validasi KLHS pada tanggal 30 Desember 2022 dengan nomor S.2113/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022 ● Masih terdapat batas indikatif antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. ○ Perbatasan Prov. Kalimantan Tengah – Prov. Kalimantan Barat ■ Kabupaten Ketapang (Kalbar) - Kabupaten Lamandau (Kalteng) ■ Kabupaten Ketapang (Kalbar) - Kabupaten Sukamara (Kalteng) ○ Perbatasan Prov. Kalimantan Tengah – Prov. Kalimantan Selatan ■ Kabupaten Barito Selatan (Kalteng) -	● Proses pembahasan Ranperda RTRW dengan DPRD	● Proses perbaikan pasca Pralinsek pada bulan Juli 2023.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Kabupaten Tabalong (Kalsel) ■ Kabupaten Kapuas (Kalteng) - Kabupaten Barito Kuala (Kalsel) ■ Kabupaten Barito Selatan (Kalteng) - Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kalsel) ■ Kabupaten Barito Timur (Kalteng) - Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kalsel) ■ Kabupaten Barito Utara (Kalteng) - Kabupaten Tabalong (Kalsel) ○ Perbatasan Prov. Kalimantan Tengah – Prov. Kalimantan Timur ■ Kabupaten Barito Utara (Kalteng) - Kabupaten Kutai Barat (Kaltim) ■ Kabupaten Barito Utara (Kalteng) - Kabupaten Paser (Kaltim) ■ Kabupaten Murung Raya (Kalteng) -		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim) ■ Kabupaten Barito Utara (Kalteng) - Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim) ● Sudah dilaksanakan pembahasan sinkronisasi pemanfaatan ruang antar perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi di sekitarnya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 yang difasilitasi oleh Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah II. ● Pra Linsek tanggal 26 - 28 Juli 2023. Serta asistensi rutin dari tanggal 11 September 2023		
6	Gorontalo	No.4 Tahun 2011	Proses Revisi	No.4 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah Nomor : B.760/MEN.KP/VIII/2022 tanggal	● Telah dilaksanakan Konsultasi Publik 1 dan 2 pada tahun 2019 ● Telah mendapatkan berita acara peta dasar dari BIG pada tanggal 24 Mei 2022 ● Telah mendapatkan validasi KLHS tanggal 10 Juli 2023	● Target Lintas Sektor direncanakan pada akhir bulan Oktober 2023	

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
					18 Agustus 2022	● Batas Wilayah: a. Gorontalo dengan Sulawesi Tengah: ★ Kab. Gorontalo Utara dengan Kab. Buol: telah mendapatkan berita acara kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2021 ★ Kab. Pohuwato dengan Kab. Buol : telah mendapatkan berita acara kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2021 ★ Kab. Parigi Moutong dengan Kab. Pohuwato: Permendagri 110 Tahun 2018 b. Gorontalo dengan Sulawesi Utara: ★ Kab. Bone Bolango dengan Kab. Kab. Bolaang Mongondow Selatan: Permendagri 92 Tahun 2017 ★ Kab. Gorontalo Utara dengan Kab. Bolaang Mongondow Utara: Permendagri 92 Tahun 2017		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						★ Kab. Bone Bolango dengan Kab. Bolaang Mongondow Utara: Permendagri 92 Tahun 2017 ● Surat Selesai Harmonisasi di Kanwil Kemenkumham tanggal 27 Juli 2023 ● Telah mendapatkan BA Kesepakatan Substansi dengan DPRD tanggal 5 September 2023		
7	Nusa Tenggara Timur	No. 1 Tahun 2011	Proses Revisi	No. 4 Tahun 2017	Matek RZWP3K Berubah Target Pertek MKP: Maret 2023	● Telah melaksanakan KP I (1 Oktober 2018) dan KP II (30 Juni 2022) ● Telah melakukan integrasi matek RZWP3K dengan materi RTRW dan sedang diproses untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Menteri KP ● Sedang menyusun KLHS terintegrasi dan melaksanakan KP-2 pada 22 November 2022 ● Sudah mendapatkan Rekomendasi BIG pada tahun 2019, sedang dilakukan updating peta dasar dengan BIG	● Mengirimkan dokumen fisik materi teknis perairan pesisir ke KKP untuk proses Persetujuan Menteri KP. ● Asistensi materi KLHS kepada KLHK. ● Perlu berkoordinasi dengan BIG terkait surat persetujuaan penggunan peta dasar. ● Mengirimkan surat usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan ke KLHK.	● Belum mendapatkan Persetujuan Menteri KP terkait materi teknis perairan pesisir. ● Belum mendapatkan validasi KLHS. ● Belum mendapatkan Surat Persetujuan penggunaan peta dasar pasca *updating* peta dasar terkait batas administrasi dan garis pantai. ● Masih menunggu surat usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dari Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Telah melakukan pembahasan sinkronisasi dengan provinsi berbatasan yaitu NTB pada tanggal 13 Desember 2017	● Mendorong sinkronisasi proses penyusunan revisi RZWP3K, revisi RTRWP, dan penyusunan KLHS.	●
8	Maluku Utara	No. 2 Tahun 2013	Proses Revisi	No. 2 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah Telah mendapatkan pertek Nomor B.1091/MEN-KP/XI/2022 pada tanggal 23 November 2022	● Telah melaksanakan KP I (7 Juli 2020), KP II (6 Oktober 2020) dan KP III (24 November 2020) ● Telah mendapatkan BA Kesepakatan Batas Daerah antara Kota Kotamobagu dengan Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Bolaang Mongondow Timur (25 Maret 2021) ● Telah mendapatkan Berita Acara TKPRD (30 Agustus 2021) ● Telah mendapatkan Validasi KLHS 660.1/624/I/DLHD/2021 (21 Oktober 2021) ● Telah mendapatkan berita acara Pembahasan dengan Provinsi (15 Desember 2021) ● Telah Selesai Selesai Harmonisasi Kanwil Kemenkumham No:	● Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menindaklanjuti konfirmasi secara tertulis dari BIG terkait penggunaan data garis pantai dari Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020 dalam Revisi RTRW Provinsi Maluku Utara. ● Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang penyesuaian terhadap garis pantai tahun 2021 yang disepakati dengan BIG. ● Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berkoordinasi dengan Kanwil BPN untuk penyesuaian data Hak Atas Tanah	-

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						W25.PP.02.03-2028 (25 April 2022) ● Telah mendapatkan BA Kesepakatan Substansi dengan DPRD No: 028/PEM-KK/KB/XII/2022 No: 44 Tahun 2022 (30 Desember 2022) Telah mendapatkan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Maluku Utara Nomor: 6.1/DGIG-PTRA/IGT.02.04/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 ● Telah mendapatkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Provinsi Maluku Utara Nomor B.1091/MEN-KP/XI/2022 tanggal 23 November 2022	● Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berkoordinasi dengan Kab/Kota terkait usulan perubahan kawasan hutan ● Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang melakukan perbaikan atas masukan sektoral dari K/L ● Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melakukan pengecekan konsistensi antara Ranperda, Lampiran Indikasi Progam, dan Album Peta (GDB) setelah pra-linsek	
9	Kalimantan Selatan	No.9 Tahun 2015	Proses Revisi	No.13 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah	● Linsek 12 Mei 2023 ● Persub : 11 Juli 2023 dengan nomor B/PB.01/2000/VII/2023	Perda No. 6 Tahun 2023	-

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
					Telah mendapatkan Pertek Nomor B.428/MEN-KP/III/2023			
10	Kalimantan Barat	No.10 Tahun 2014	Proses Revisi (mulai tahun 2021)	No.1 Tahun 2019	Matek RZWP3K Tidak Berubah	● sudah melaksanakan KP 1 dan KP 2 pada Tahun 2023. ● Pembahasan dengan FPR Provinsi telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023; ● sedang diskusi atau pembahasan awal dengan DPRD. ● sedang dalam proses asistensi Peta Dasar. ● Validasi KLHS sudah sampai tahapan pra validasi, masih proses perbaikan muatan KLHS pasca pembahasan. ● Masih terdapat batas indikatif antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah: ○ Kabupaten Ketapang (Kalbar) - Kabupaten Lamandau (Kalteng)	● akan segera melaksanakan pembahasan harmonisasi Ranperda dengan Kantor Wilayah Kemenkumham. ● akan dilakukan pembahasan dengan DKP terkait integrasi dan penyesuaian muatan Perda RZWP3K. serta akan koordinasi lebih lanjut dengan KKP. ● sinkronisasi muatan revisi RTRW Provinsi Kalbar dengan muatan RTRW Kabupaten/Kota serta penyepakatan KP2B. ● memperbaiki substansi Ranperda sesuai	● Diskusi pembahasan antara DKP dengan KKP terkait penyesuaian muatan substansi Perda RZWP3K ke dalam revisi RTRWP cukup lamban. ● proses sinkronisasi muatan revisi RTRWP dan proses penyepakatan KP2B dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Telah dilaksakan pembahasan dengan Kab/Kota, namun terkendala oleh penyepakatan KP2B dengan Kabupaten Ketapang. ● adanya permasalahan batas wilayah

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						○ Kabupaten Ketapang (Kalbar) - Kabupaten Sukamara (Kalteng) ● RZWP3K tidak ada perubahan, sedang dalam pembahasan dengan KKP terkait penyesuaian muatan Perda RZWP3K ke dalam revisi RTRWP. ● Asistensi terakhir dilaksanakan pada 31 Agustus dan 1 Juli.	dengan catatan MOM 31 Agustus dan 1 Juli. ● Dilakukan koordinasi antara DPUPR, Bappeda, dan Dinas terkait dalam rangka percepatan penetapan RTRWP. ● melakukan konfirmasi muatan sektoral kepada K/L terkait. ● melakukan asistensi Peta Dasar dengan BIG. ● melakukan asistensi KLHS dengan KLHK secara *offline*. ● diagendakan pembahasan dengan DPRD, paralel dengan pembahasan/sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota ● Target pelaksanaan Linsek pada bulan Desember 2023	administrasi antara Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau di Provinsi Kalimantan Tengah. Belum adanya kesepakatan antara kedua Provinsi. ●

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
11	Sulawesi Utara	No.1 Tahun 2014	Proses Revisi	No.1 Tahun 2017	Matek RZWP3K Berubah Target Pertek MKP: Tahun 2023	● Peninjauan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sebelum terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak diperlukan lagi surat rekomendasi dari menteri dan peninjauan kembali revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang sebelumnya masih dapat digunakan, meliputi: a. SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 117 Tahun 2019, Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034; b. SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 219a Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 tentang	● Target Lintas Sektor revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara, yaitu pada bulan Januari Tahun 2024. ● Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan akan disampaikan pada 11 s.d 13 Oktober 2023. ● Buku materi teknis dan buku fakta analisa yang terintegrasi dengan materi teknis perairan pesisir diagendakan selesai bulan Oktober 2023; ● Sedang menunggu dokumen Persetujuan Teknis dari Menteri KKP. Apabila telah disetujui akan dilanjutkan dengan pembahasan pembahasan integrasi dengan FPR dan akan dilaksanakan Konsultasi Publik.	● Penyesuaian pola ruang kawasan hutan dengan Surat Keputusan (SK) 6622/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Tahun 2020 serta inventarisasi usulan perubahan kawasan hutan dari kabupaten/kota. Dimana usulan tersebut akan diakomodir dalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ● Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki anggaran untuk memproses usulan perubahan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034; dan c. SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 226 Tahun 2018, Tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034. ● Telah dilaksanakan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara dengan Kota Manado pada tanggal 26 Oktober 2022 dan dengan Kota Kotamobagu pada tanggal 7 Desember 2022.		Sampai saat ini, dari 15 kab/kota baru 9 kabupaten yang telah mengajukan permohonan.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Telah dilaksanakan Asistensi Ketiga terkait Peta Dasar dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 7 Desember 2022. ● Dalam proses penyusunan Naskah Akademik bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara. ● Progres penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terintegrasi telah sampai pada tahap keempat, yaitu identifikasi Kebijakan Rencana dan Program yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. ● Peta rencana pola ruang revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah disusun dan untuk peta rencana struktur ruang masih dalam tahap penyusunan oleh tim teknis revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara.		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Telah konsultansi muatan substansi revisi RTRW Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktorat Binda II pada 20-21 Maret 2023		
12	Maluku	No.16 Tahun 2013	Proses Revisi	No. 1 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah Telah mendapatkan pertek Nomor B.1003/MEN-KP/X/2022 pada tanggal 25 Oktober 2022	● Telah melaksanakan KP I (27 Januari 2022) dan KP II (28 Juni 2022) ● Telah mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 Untuk Penyusunan RTRW Provinsi Maluku Nomor: 21.9/DIGT-BIG/IGT.02.04/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 ● Telah mendapatkan Surat Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Nomor S.269/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku tahun 2022 - 2042 ● Telah melakukan	● Pembahasan dengan DPRD Provinsi Maluku tentang RTRW Provinsi Maluku ● Pembahasan kesepakatan batas wilayah dengan Provinsi Maluku Utara ● Provinsi Maluku akan mengirimkan surat usulan tambahan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada KLHK	● Belum terdapat berita acara pembahasan RTRW Provinsi Maluku dengan DPRD Provinsi Maluku ● Terdapat penyesuaian batas wilayah kewenangan laut berdasarkan peta kerja Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Kemendagri pasca dilaksanakan kegiatan konfirmasi program dan rencana sektoral pada tanggal ● Belum ada kesepakatan terkait Pulau Pisang, Pulau Pisang Kecil, Pulau Siloyang, Pulau Waitenger, dan Pulau Tapiola antara Provinsi

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham yang disepakati dalam Berita Acara Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 tanggal 6 April 2023 ● Gubernur Maluku telah mengirimkan surat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari 11 (sebelas) kabupaten/kota kepada KLHK pada tanggal 30 November 2022 ● Pemerintah Provinsi Maluku telah mengadakan kesepakatan KP2B pada tanggal 26 Desember 2022		Maluku dengan Provinsi Maluku Utara
13	Kalimantan Utara	No.1 Tahun 2017	Proses Revisi	No. 4 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah	● Proses revisi RTRW baru dimulai di 2022. ● Proses perubahan materi teknis pengaturan perairan	● KLHS akan masuk ke tahap pra validasi menunggu dokumen matek	● perbedaan garis pantai antara BIG dan KKP ● Perbedaan kawasan hutan (HP) dengan

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
					Target Pertek MKP: Agustus 2022	pesisir sebelum diintegrasikan dengan RTRWP ● Belum ada KLHS terintegrasi ● Proses Asistensi dengan BIG untuk peta dasar terakhir dilaksanakan tgl 6-16 juni 2022. ● telah dilaksanakan FGD Penyusunan Perubahan Matek Muatan Perairan Pesisir pada tgl 9 juni 2022 ● telah dilaksanakan KP-1 Penyusunan KLHS RTRW Provinsi Kaltara pd tgl 23 Juni 2022 ● Telah dilaksanakan KP-2 tanggal 31 Oktober 2022 ● Batas Daerah dengan Provinsi Kaltim sudah Definitif semua. ● Sudah dianggarkan utk tahun 2023 utk target persub dan perda dan mulai bulan Februari 2023	RTRW yg akan disinkronisasi dgn matek RZWP3K. diagendakan bulan November ini ● Peta Dasar sedang dalam proses saat ini perbaikan batas Admin, Garis Pantai, dll ● matek RZWP3K akan dilaksanakan KP di bln November di minggu 3 atau 4. Setelah itu baru ke linsek pusat.	RZWP3K (kawasan tambak)
14	Sulawesi Tenggara	No.2 Tahun 2014	Proses Revisi	No.9 Tahun 2018	Matek RZWP3K Berubah	● Telah mendapatkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi	a. Draft rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	● Tumpang tindih perkembangan Proyek Strategis Nasional dengan

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
					Telah mendapatkan Pesetujuan Teknis Nomor B.811/MEN-KP/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	Sulawesi Tenggara dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.811/MEN-KP/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022. ● Telah dilaksanakan Konsultasi Publik yang membahas muatan darat dan laut, terdiri dari Konsultasi Publik I pada 26 September 2022 dan Konsultasi Publik II pada 6 Desember 2022. ● Telah dilakukan pembahasan naskah akademik ranperda pada tanggal 7 Desember 2022 dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan akademisi. ● Telah mendapatkan Berita Acara penyepakatan KP2B/LP2B dan substansi revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dengan	dan GDB Peta Rencana dan Tematik pada Minggu ke-4 Bulan september Tahun 2023; b. Tabel persandingan perubahan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (yang masih berlaku) dengan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu ke-1 Bulan Oktober Tahun 2023; c. kelengkapan Berita Acara Kesepakatan Substansi antara Gubernur dengan DPRD pada pada Minggu ke-1 Bulan Oktober Tahun 2023; d. Tabel pemeriksaan mandiri pada	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang telah dikeluarkan.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan tabel persandingan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dengan RTRW Kabupaten/Kota pada bulan Februari 2023 secara berkala. ● telah mendapatkan Dokumen dan Validasi KLHS pada 18 Februari 2023; ● Telah mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar untuk penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8.2/KA-BIG/IGT.02.06/6/2023 tanggal 5 Juni 2023;	Minggu ke-4 Bulan Mei Tahun 2023; e. Target Lintas Sektor revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pada minggu ke-3 bulan Oktober Tahun 2023.	

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Telah dilaksanakan pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi (FPR) yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat FPR Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 001/BA/FPR/V/2023 pada 30 Mei 2023; ● telah mendapatkan Berita Acara Harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara pada 13 Juli 2023; ● telah mendapatkan		

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Permasalah batas wilayah: a. Batas antar provinsi: Pulau Kawi-Kawia (Kabupaten Buton Selatan - Kabupaten Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan)) b. Batas antar kabupaten/kota: Kota Kendari - Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari - Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe - Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna - Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna - Kabupaten Buton Tengah, Kota Baubau - Kabupaten Buton Selatan.		
15	Sulawesi Barat	No.1 Tahun 2014	Proses Revisi	No.6 Tahun 2017	Matek RZWP3K Berubah	● Telah melaksanakan Konsultasi Publik I pada 14 Juni 2021) dan Konsultasi Publik II (30 November 2021)	● Sedang melengkapi lampiran BA sinkronisasi muatan RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten. ● Sedang mengintegrasikan	● Terdapat permasalahan batas wilayah perbatasan berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2018 antara Kabupaten Pasangkayu

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						● Telah mendapatkan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Barat dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.232/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023; ● Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan asistensi ke-8 peta dasar dan telah mendapatkan Laporan Pendampingan dan Supervisi Peta Dasar Skala 1:250.000 dalam Rangka Penyusunan Peta Dasar RTRW Provinsi Sulawesi Barat Pendampingan dan Supervisi ke-08 dari Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial. ● Telah melakukan sinkronisasi RTRW Provinsi	muatan RTRW dengan muatan KLHS	(Provinsi Sulawesi Barat) dengan Kabupaten Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) yang berimplikasi terhadap penundaan rekomendasi Peta Dasar dari BIG ● Terdapat usulan perubahan kawasan/alih fungsi kawasan hutan terhadap 6 kabupaten. Belum berproses dengan Dinas Kehutanan Provinsi karena baru 3 kabupaten yang mengusulkan (Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamasa), kabupaten yang belum (Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene). ● Belum mendapatkan validasi KLHS terintegrasi dan saat ini tengah berproses. Status terakhir Pra

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						Sulawesi Barat dengan Kabupaten: - Kabupaten Polewali Mandar pada 23 Juni 2022 - Kabupaten Mamasa pada 6 Oktober 2022 - Kabupaten Majene pada 10 Oktober 2022 - Kabupaten Mamuju Tengah pada 10 Oktober 2022 - Kabupaten Pasangkayu pada 13 Oktober 2022 - Kabupaten Mamuju pada 21 Juni 2023 ● Telah melakukan penyepakatan KP2B - Kabupaten Mamasa pada 15 Februari 2023 - Kabupaten Majene pada 15 Februari 2023 - Kabupaten Mamuju Pada 16 Februari 2023 - Kabupaten Pasangkayu Pada 16 Februari 2023		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan KLHK pada tanggal 22 November 2022, pra validasi ini belum terintegrasi muatan laut & darat pada laporan akhir materi teknis. ● Telah dilakukan pembahasan sinkronisasi RTRW Provinsi dengan 6 kabupaten namun lampiran BA belum *clear* karena kabupaten harus melakukan pengecekan kembali.

No	Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Perda RZWP3K	Status Pertek Menteri KP*	STATUS REVISI RTRW PROVINSI	Tindak Lanjut	Kendala
						- Kabupaten Polewali Mandar Pada 17 Februari 2023 - Kabupaten Mamuju Tengah Pada 17 Februari 2023 ● Koordinasi terakhir: 5 Mei 2023 Konsultasi Muatan Substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat		